

Judul : Pembebasan sandera jangan sampai berlarut
Tanggal : Rabu, 03 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KEAMANAN PAPUA

Pembebasan Sandera Jangan Sampai Berlarut

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan agar pilot Susi Air, Philip Mehrrens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB dapat segera dibebaskan karena penyanderaan itu termasuk kejahatan serius. Pelakunya pun semestinya dihukum.

Meski demikian, pelaksanaan pembebasan itu tetap harus mengedepankan kehati-hatian dan terukur agar tidak menimbulkan korban dari warga sipil ataupun prajurit TNI.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Siro, saat ditemui di Jakarta, Selasa (2/5/2023). Menurut dia, penyanderaan pilot yang sudah berlangsung sejak 7 Februari lalu itu adalah kejahatan serius karena menasar warga sipil yang merupakan warga negara asing. Dalam konteks Papua, proses penegakan hukum tidak bisa dilakukan se-

cara normal, tetapi harus mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Atnike mengatakan, ketika Panglima TNI mengumumkan status siaga tempur untuk operasi pembebasan sandera, Komnas HAM telah meminta agar pemerintah memastikan prinsip-prinsip HAM di dalam penanganannya. Dalam hal ini, perlindungan bagi warga sipil harus diprioritaskan.

Skala operasinya juga harus terukur dengan pengerahan pasukan yang cukup sehingga tak memperluas wilayah konflik. "Situasi kedaruratan harus dilokalisir dan ditangani secara profesional," ucapnya.

Merugikan warga

Komnas HAM, menurut Atnike, berharap agar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai pihak yang melakukan penyanderaan ataupun aparat keamanan me-

iliki pemahaman bersama bahwa penyanderaan tidak boleh berlarut-larut. Sebab, baik kelompok yang melakukan penyanderaan, aparat keamanan, maupun warga sipil bisa terdampak.

"Warga jadi harus mengungsi dan tak bisa mencari nafkah," ujar Atnike.

Dalam kesempatan terpisah, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengingatkan agar para prajurit TNI melaksanakan tugasnya dengan maksimal untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Sebab, negara dan rakyat telah memercayakan keutuhan dan kedaulatan negara kepada TNI. "TNI diciptakan untuk rakyat dan untuk membela rakyat," ucap Yudo.

Peneliti politik keamanan CSIS, Nicky Fahrizal, pun berpendapat agar tim yang diterjunkan untuk membebaskan sandera di Papua itu merupa-

kan pasukan kecil, tetapi mampu. Untuk itu, dibutuhkan orkestrasi kebijakan dari Presiden karena setidaknya ada beberapa instansi pemerintah yang menangani masalah penyanderaan

tersebut, salah satunya Kementerian Pertahanan. "Ketika ada kebijakan holistik, maka bisa disusun strategi yang lebih jelas dan terukur," ujar Nicky.

(DEA/EDN)

DPR - RI